

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Konflik

1. Pengertian Konflik

Menurut Ramlan Surbakti (1992:149) menyebutkan pengertian konflik yaitu “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Definisi konflik (dari kata *confligere*, *conflicium*=saling berbenturan) ialah semua bentuk benturan, tabrakan, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi dan interaksi–interaksi yang antagonistic–bertentangan. (Kartini Kartono, 1983;245).

Menurut Eep Saefullah Fatah (1994:46-47) konflik adalah Suatu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, paham atau kepentingan di antara dua pihak atau lebih. Pertentangan ini dapat berbentuk non fisik, bisa juga berkembang menjadi benturan fisik, bisa berkadar tinggi dalam bentuk kekerasan (*violent*) ataupun berkadar rendah yang tidak menggunakan kekerasan (*non-violent*).

Konflik dapat diterjemahkan sebagai oposisi, interaksi yang antagonistic atau bertentangan, benturan antara macam–macam paham, perselisihan, kurang mufakat, pergesekan, perkelahian, perlawanan dengan senjata dan perang. Konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian hidup

manusia yang bersosial dan berpolitik dan pendorong dalam dinamika dan perubahan Sosial politik (Kornblurn, 2003;294).

Konflik adalah ketidakstabilan, ketidakharmonisan, dan ketidakamanan dibidang tertentu yang membuat masyarakat hidup tidak nyaman (Gaffar, 1999;147). Konflik berasal dari Bahasa Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik adalah unsur terpenting dalam kehidupan Manusia. Karena Konflik memiliki fungsi positif (George Simmel, 1918; Lewis coser, 1957), konflik menjadi dinamika sejarah manusia (Karl marx,1880/2003; Ibnu Khaldun, 1332-1406), konflik menjadi entitas Sosial (Max Weber, 1918/1947; Ralf Dehrendorf, 1959), dan konflik adalah bagian dari proses pemenuhan kebutuhan dasar manusia (Maslow, 1954; Max Neef, 1987; Jhon Burton, 1990; Marshal Rosenberg, 2003).

Konflik adalah Aspek intrinsik dan tidak mungkin untuk dihindari dalam perubahan sosial. Konflik adalah sebuah *ekspresi heterogenitas* kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan. Cara menangani konflik adalah persoalan kebiasaan dan pilihan. Manusia adalah makhluk konfliktis (*homo conflic*), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun Poerwadinata (1976), konflik berarti pertentangan atau percekocokan. Pertentangan sendiri bisa muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara dua belah pihak bersebrangan. Francis

menambahkan unsur persinggungan dan pergerakan sebagai aspek tindakan sosialnya (2006:7). Sehingga secara sederhana konflik adalah pertentangan yang ditandai oleh pergerakan dari beberapa pihak sehingga terjadi persinggungan.

Pengertian konflik di atas sesuai dengan apa yang didefinisikan oleh Pluit dan Rubin dengan mengutip Webster bahwa “konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak–pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan” (Pluit dan Rubin, 2004;10)

Konflik merupakan suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak, ketika keduanya menginginkan suatu kebutuhan yang sama dan ketika adanya hambatan dari kedua pihak, baik secara potensial dan praktis. Sedangkan integrasi adalah proses mempersatukan masyarakat, yang cenderung membuat masyarakat menjadi lebih baik atau harmonis. Di samping itu integrasi juga dipahami sebagai suatu pernyataan yang sudah dicapai, atau sudah dekat untuk dicapai.

Konflik–konflik sangatlah beragam, dan dilihat dalam ruang yang luas dan kompleks dapat dilihat dari berbagai dimensinya. Banyak basis kolektivitas sosial merupakan sumberdaya yang memungkinkan hubungan antarkelompok sosial. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya sebuah konflik, yang sewaktu–waktu dapat berkembang menjadi sebuah konflik yang besar. Melihat formasi konflik muncul dari perubahan sosial, kemudian membawanya menuju proses transformasi konflik kekerasan atau konflik tanpa kekerasan, dan melahirkan perubahan sosial yang lebih ekstrim dalam posisi tertekan suatu kelompok akan melakukan apapun untuk mempertahankan norma-norma yang mereka miliki.

Setiap skala memiliki latarbelakang dan arah perkembangannya, masyarakat manusia di dunia pada dasarnya memiliki sejarah konflik dalam skala antara perorangan sampai antarnegara. Konflik yang bisa dikelola secara arif dan bijaksana akan mendinamisasi proses sosial dan bersifat konstruksi bagi perubahan sosial masyarakat dan tidak menghadirkan kekerasan.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa Konflik dari semenjak dulu telah ada dalam masyarakat. Konflik dapat diklasifikasikan dalam berbagai tingkatan dan skala yang berbeda. Jadi menurut penulis konflik adalah pertikaian sebagai gejala ketidaksesuaian yang tidak mungkin dihindari dalam kehidupan sosial masyarakat dilihatnya sebagai gejala yang mencakup berbagai proses yang tidak mungkin terpisah-pisahkan, namun dapat dibedakan dalam analisis.

2. Latar Belakang Konflik

Latar belakang konflik ialah awal mula penyebab sebuah gesekan–gesekan yang melahirkan sebuah ketidaksesuaian dan berkembang menjadi sebuah konflik. Latarbelakang sebuah konflik melahirkan intensitas konflik yang juga berbeda. Latar belakang konflik adalah suber seberapa besarkah konflik yang akan muncul, bisa kecil, sedang, dan besar.

Konflik timbul karena adanya kesenjangan fakta dan realita dalam masyarakat. Konflik terjadi antarindividu atau antarkelompok yang memperebutkan hal yang sama, tetapi konflik akan slalu menuju kearah kesepakatan (*consensus*). Selain itu, masyarakat tak mungkin terintegrasi secara permanen dengan mngandalkan kekuasaan paksaan dari kelompok yang dominan. Sebaliknya, masyarakat yang terintegrasi atas dasar consensus sekalipun, tak mungkin bertahan secara permanen dengan tanpa adanya paksaan, konflik dan consensus merupakan gejala-gejala yang tak terelakkan dalam masyarakat.

Pada dasarnya konflik didasarkan oleh dua hal. Konflik mencakup kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal, yang dimaksud dengan kemajemukan Horizontal adalah Struktur masyarakat yang majemuk secara kultural seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras, dan juga majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi, seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil, militer, wartawan, dokter, alim ulama, cendekiawan, dan dalam arti perbedaan karakteristik tempat tinggal seperti kota dan desa.

Kemajemukan horizontal kultural dapat menimbulkan konflik karena masing-masing unsur kultur berupaya mempertahankan identitas dan karakteristik budayanya dari ancaman kultur lain dalam masyarakat yang berciri demikian ini, apabila belum ada suatu konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik karena benturan budaya akan menimbulkan perang saudara, ataupun gerakan separatisme. Kemajemukan vertikal adalah struktur masyarakat yang terpolarisasi menurut kepemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sebab sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan akan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kelompok kecil masyarakat yang mendominasi ketiga sumber pengaruh tersebut. Jadi, distribusi kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan yang pincang merupakan penyebab utama timbulnya konflik.

Konflik terjadi manakala terdapat benturan kepentingan. Dalam rumusan lain dapat dikemukakan konflik dapat terjadi jika ada pihak yang diperlakukan tidak adil manakala titik kemarahan sudah melampaui batas. Potensi Konflik terjadi manakala terjadi kontak antarmanusia. Sebagai individu yang terorganisasi dalam kelompok, individu ingin mencari jalan untuk memenuhi tujuannya. Peluang untuk memenuhi tujuan itu hanya melalui pilihan bersaing secara sehat untuk mendapatkan apa yang

dibutuhkan, atau terpaksa terlibat dalam konflik dengan pihak lain. Berarti, dalam setiap masyarakat, selalu ada peluang sangat besar bagi terjadinya kompetisi dan konflik. Karena acap kali hasil konflik itu buruk, maka persepsi kita tentang konflik cenderung negatif. Harus diingat, semua konflik tidak sama, kita berhadapan dengan konflik yang berbeda menurut level. Kita mungkin tidak sepakat dengan beberapa isu dalam keluarga, teman, dan rekan sekerja, disini konflik seperti itu lebih mudah dipecahkan (Prasangka dan Koflik; Alo Liliweri, M.S;256).

Ketika mempelajari dan meneliti konflik, kita harus dapat membuat deskripsi yang jelas mengenai sumber atau sebab yang memicu terjadinya konflik. Ada 2 hal umum yang patut diperhatikan dalam membahas sumber atau sebab konflik, yakni (1)konteks terjadinya konflik dan (2)sumber–sumber konflik. Mengenai konteks terjadinya konflik dapat dikatakan bahwa konflik terjadi dalam beragam konteks, mulai dari konteks antarpribadi, komunitas, komunal, regional, dalam negara sendiri hingga antarnegara. Dari beragam konteks itulah bersumber konflik karena ketidaksetaraan atau perbedaan disposisi, persepsi, orientasi nilai, sikap, dan tindakan dalam merespon situasi sosial, historis, kesadaran sosial, ekonomi, ideologi, politik, bahkan situasi yang berkaitan dengan kejadian–kejadian mutakhir konflik.

3. Tipe – tipe Konflik.

1. Konflik Sederhana

Konflik tipe ini masih pada taraf emosi dan muncul dari perasaan berbeda yang dimiliki oleh individu. Ada empat tipe konflik sederhana:

- (1) Konflik personal versus diri sendiri adalah konflik yang terjadi karena apa yang dipikirkan atau yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan.
- (2) Konflik personal versus personal adalah konflik antarpersonal yang bersumber dari perbedaan karakter masing-masing personal.

(3) Konflik personal versus Masyarakat adalah konflik yang terjadi antara individu dan Masyarakat yang bersumber dari perbedaan keyakinan suatu kelompok atau keyakinan Masyarakat atau perbedaan hukum.

(4) Konflik personal versus alam adalah konflik yang terjadi antara keberadaan personal dan tekanan alam.

2. Konflik berdasarkan Sifat

Tipologi konflik dapat dilihat dari sifat gerak-dinamika konflik. Dari segi dinamika, konflik berproses dari:

1). Adanya keyakinan bahwa setiap konflik mempunyai struktur tertentu, dan struktur itu umumnya bersifat laten yang mempunyai karakteristik, sifat, atau modus operandi yang relatif hampir sama dan berulang-ulang.

2). Konflik yang bersifat manifes, konflik laten yang menjadi konflik yang nyata (manifes).

3). Kadang–kadang sifat konflik itu tidak laten juga tidak manifes. Melainkan datang sebagai sebuah peristiwa yang luar biasa karena tidak ada catatan modus operandi sebelumnya.

Ketiga sifat tersebut mendorong perilaku konflik dan setiap perilaku konflik diselesaikan dengan manajemen konflik sesuai sifatnya. Hasil penyelesaian itu dapat menjadi sumber informasi kepada kita tentang struktur sebuah konflik.

3. Konflik Berdasarkan Jenis Peristiwa dan Proses

Kita dapat membedakan konflik berdasarkan jenis peristiwa dan proses. Sebagai jenis peristiwa dikenal beberapa tipe konflik:

1. Konflik biasa adalah konflik yang terjadi karena hanya karena adanya kesalahfahaman akibat distorsi informasi. Melibatkan hubungan antarpersonal yang sejawat, awalnya didorong oleh faktor emosi.
2. Konflik luar biasa adalah konflik yang tidak berstruktur karena sebelumnya kita tidak mempunyai catatan mengenai modus operandinya.
3. Konflik Zero-Sum (*game*) adalah bentuk konflik yang hasilnya adalah satu pihak menang dan pihak lain kalah (*win-lose*)
4. Konflik merusak adalah konflik yang dari proses sampai hasilnya merusak sistem relasi sosial.
5. Konflik yang dapat dipecahkan adalah konflik substantif karena dapat dipecahkan melalui sebuah keputusan bersama.

Kita juga dapat membedakan konflik dari segi proses yang terdiri atas:

- a. Konflik yang sedang terjadi.
 - b. Konflik dengan sifat khusus, yang modus operandinya tidak berstruktur sehingga menampilkan proses yang berbeda dengan jenis konflik yang sama.
 - c. Konflik Produktif, yakni jenis konflik yang dapat diselesaikan dan hasilnya akan mendorong peningkatan relasi dari dua belah pihak yang terlibat konflik.
 - d. Konflik yang dapat dikelola adalah konflik yang karena sifatnya dapat dikelola bagi keuntungan dua belah pihak.
4. Konflik Berdasarkan Faktor Pendorong

Konflik terjadi karena berbagai faktor pendorong, yang secara psikologis dilakukan karena para pelaku konflik merubah respon terhadap perubahan stimulus. Misalkan, satu pihak merubah atau membuat klarifikasi baru berupa gagasan yang ditunjukkan kepada pihak lawan. Ada beberapa kategori faktor

yang memungkinkan kita menentukan tipe konflik berdasarkan (1)Konflik Internal (2)konflik Eksternal (3)Konflik Realistik (4)Konflik Tidak Realistik.

4. Manajemen Konflik

John Burton dalam *Conflict : Resolution and Provention (1990)* menyebut konflik bersumber dari *basic human needs* (kebutuhan dasar manusia). Setiap kepentingan memiliki tujuan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar, baik yang tersedia secara sosial maupun lingkungan alam. Semakin sederhana dimensi kebutuhan dasar yang diperjuangkan oleh beberapa kepentingan berkonflik, proses pemecahan masalah bisa lebih sederhana dan cepat tercapai. Kebutuhan terhadap kekayaan bisa berkembang menjadi kebutuhan kekuasaan, status, sampai identitas. Kompleksitas sumber konflik ini mempengaruhi bagaimana kelembagaan pengelolaan konflik harus diciptakan dan dijalankan.

Strategi konflik pada prakteknya muncul dalam bentuk–bentuk perilaku tertentu. Pluit dan Rubin mengkategorikan lima strategi konflik kelompok–kelompok kepentingan, yaitu strategi *contending* (keras), *withdrawing* (menarik diri), *yielding* (menyerahkan keputusan), *compromy* , dan *problem solving* (pemecahan masalah). Kelima strategi tersebut digunakan oleh pihak–pihak yang berkonflik dalam kaitannya dengan usaha pencapaian tujuan. Setiap strategi akan diterjemahkan dalam bentuk tindakan–tindakan tertentu baik secara individual maupun kolektif.

Pertama strategi konflik *contending* dicirikan oleh penolakan terhadap aspirasi pihak lain, dan semua proses penyelesaian konflik harus menguntungkan tujuan dalam konflik. Akibat dari strategi konflik ini adalah munculnya komunitas dan praktek kekerasan sehingga menyebabkan hubungan–hubungan ketegangan, ancaman, dan saling meniadakan. Hubungan yang tercipta dalam konflik ini adalah *zero-sum game* atau hubungan menang kalah. Dampak strategis konflik *contending* adalah menang

satu pihak dan kalah dipihak lain, atau keduanya kalah dan hancur. *Kedua* adalah strategi konflik *Withdrawing* yang mana salah satu atau kedua belah pihak mengundurkan diri atau mencabut semua tuntutan, dan hubungan konflik berhenti tanpa resolusi apapun. Strategi ini bisa muncul ketika satu atau dua pihak merasa eksistensi atau keselamatannya terancam. *Ketiga* strategi konflik *Yielding*, yaitu tindakan menyerahkan apapun keputusan dan bentuk resolusi yang diberikan oleh pihak lawan. *Keempat* strategi konflik *compromy* yang berarti masing–masing pihak hanya menargetkan memperoleh sebagian dari tuntutan mereka.

Proses mencapai pemecahan akar masalah dalam relasi konflik, menurut Johan Galtung (2007) secara ideal perlu menggunakan *transcend approach* atau pendekatan *transidental* yang berarti adanya kesadaran dan keahlian dalam pihak berkonflik untuk menemukan bentuk tujuan baru yang bisa menguntungkan seluruh pihak. Setiap strategi konflik akan muncul dalam bentuk tindakan individu maupun kolektif yang bervariasi dan memiliki konsekwansi masing–masing. Konflik dapat diterjemahkan sebagai oposisi, interaksi yang antagonistik atau bertentangan, benturan antara macam–macam paham, perselisihan, kurang mufakat, pergesekan, perkelahian, perlawanan dengan senjata dan perang. Konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik dan pendorong dalam dinamika dan perubahan social politik (Kornblurn, 2003;294).

Secara pendekatan Psikososial atas konflik, ada pendekatan yang akan digunakan didalam penelitian ini yaitu pendekatan historis. Pendekatan Historis merupakan pendekatan yang lebih mengandalkan catatan sejarah warisan suatu kelompok. Setiap kelompok seolah–olah merasa bebas menginterpretasikan diri sebagai yang terbesar dan terhormat, sehingga mereka harus menjadi superior dan mendominasi

status dan peran dalam bidang sosial politik dan ekonomi. Akibatnya, kelompok superior menciptakan kondisi untuk mendominasi status dan peran dan menjadikan kelompok lain secara inferior. seperti ditunjukkan oleh penelitian Lohman dan Reitzes (1951).

5. Tahap Konflik

Analisis dasar tahapan konflik ada lima tahap, yang umumnya disajikan secara berurutan. Tahapan ini adalah:

1. Prakonflik

Ini merupakan periode dimana terdapat suatu ketidak sesuaian sasaran diantara dua belah pihak atau lebih, sehingga timbullah sebuah konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan diantara beberapa pihak atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain pada tahap ini.

2. Konfrontasi

Pada tahap ini konflik terjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah. Mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif. Pertikayan atau kekerasan pada tingkat rendah lainnya terjadi diantara kedua belah pihak. Masing-masing pihak mungkin mengumpulkan sumber daya dan kekuatan dan mencari sekutu dengan harapan dapat meningkatkan konfrontasi dan kekerasan. Hubungan diantara kedua belah pihak menjadi sangat tegang, mengarah pada polarisasi antara para pendukung dimasing-masing pihak.

3. Krisis

Ini merupakan puncak konflik, ketika ketegangan dan kekerasan terjadi paling hebat. Dalam konflik skala besar, ini merupakan periode perang, ketika kedua belah pihak jatuh korban dan saling membunuh. Komunikasi normal diantara kedua belah pihak kemungkinan terputus. Pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak-pihak lainnya.

4. Akibat

Suatu konflik pasti akan meninggalkan akibat. Satu pihak mungkin menakhlikan pihak lain, atau mungkin melakukan gencatan senjata. Satu pihak mungkin menyerah dengan sendirinya, atau menyerah atas desakan pihak lain. Keduabelah pihak mungkin setuju untuk bernegosiasi dengan atau tanpa perantara. Suatu pihak yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga yang mungkin lebih berkuasa memaksa duabelah pihak untuk menghentikan pertikaian. Apapun keadaannya, tingkat ketegangan, konfrontasi dan kekerasan pada tahap ini agak menurun, dengan kemungkinan adanya penyelesaian.

5. Pasca konflik

Situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai macam konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah pada situasi normal diantara kedua belah pihak. Namun isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka yang saling bertentangan tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali lagi menjadi situasi prakonflik.

6. Akar Kekerasan konflik

Ada dua perspektif teoritis yang menjelaskan kekerasan dalam konflik. *Pertama* adalah perilaku kekerasan menjadi bagian dari pola hubungan-hubungan konflik dari masyarakat yang rentan konflik seperti masyarakat Indonesia. Masyarakat rentan konflik bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti *social cleavages* yang membagi

masyarakat pada berbagai kelompok identitas. Kondisi social ini akan muncul dalam bentuk *reciprocal antagonisem* (permusuhan timbal balik), (Cosser, 1957) dan *coercive behavior* (prilaku kekerasan), (Bartos dan Weher, 2003) takkala masing–masing kelompok harus saling bersaing untuk meraih sumberdaya yang terbatas. Kekerasan menjadi prilaku kolektif dengan mengikuti pola dan karakter modal sosial (*social capital*) (Putnam, 2000) atau sumber konflik (*conflict resource*) (Bartos dan Weher, 2003) yang menjadi mesin pergerakan sosial dan mobilisasi massa. *Kedua* adalah lemahnya pelembagaan tatakelola konflik dalam masyarakat yang berkompetisi memperebutkan sumber–sumber daya terbatas.

Pelacakan prilaku kekerasan dalam konflik–konflik secara teoritis bisa dilacak secara teoritis melalui teori akar kekerasan (Rule, 1988), tindakan konflik dari John Bartos dan Paul Wehr (2003), dan modal sosial (Putnam 2000; Bourdieu; 1991). Selanjutnya bagaimana kualitas pelembagaan tatakelola konflik produktif melalui teori John Burton (1998), pendekatan transendental dari Johan Galtung (2004). Rule memilah akar prilaku kekerasan menjadi dua, yaitu kekerasan sebagai kalkulasi rasional dan kekerasan irasional. Menurutnya kekerasan sebagai kalkulasi rasional merupakan bagian dari upaya manusia mencapai tujuan. Dengan mengutip Thomas Hobbes, Rule menjelaskan bahwa manusia menyadari dunia adalah tempat yang penuh dengan persaingan dari berbagai manusia yang memperjuangkan tujuan masing–masing. Hobbes menggunakan istilah lain (*homo homini lupus*) (Rule,1988). Sedangkan kekerasan sebagai produk irasional adalah kondisi tercerabutnya prilaku dari tatanan normatif yang sering terjadi dalam situasi kerumunan. Situasi kerumunan melahirkan mentalitas kerumunan (*crowd mentality*) yang mendorong para individu di dalamnya berperilaku liar tanpa terkendali, dan merebabnya isu–isu yang tidak jelas dalam kerumunan (Rule, 1998).

Menurut Bardos dan Wehr tindakan koersif adalah tindakan sosial yang memaksa pihak lawan untuk melakukan sesuatu. Terdapat dua dimensi tindakan koersif, yaitu *actual coercion* (koersi nyata) dan *threat coercion* (koersi ancaman). Koersi nyata adalah tindakan melukai ataupun menghancurkan lawan. Tindakan ini bisa muncul pula dalam bentuk kekerasan psikologis yang menghasilkan luka simbolis (*symbolic injury*). Tujuan utama dari koersi nyata adalah menghilangkan kapasitas pihak lawan untuk melanjutkan konflik. Sedangkan koersi ancaman bertujuan menekan agar lawan menurunkan keinginan mencapai tujuan pada tingkat tertentu. Bentuk koersi ini muncul dalam bentuk intimidasi dan negosiasi sekaligus. *Non coercive action* adalah upaya mencari jalan keluar dan pemecahan masalah konflik, Bartos dan Wehr, 2003. (Susan Novri, 2012;24).

7. Kerangka Teori Konflik

Dahrendorf melihat konflik pada dasarnya memiliki dua makna. *Pertama*, konflik adalah konsekuensi atau akibat dari tidak tuntasnya proses integrasi di dalam suatu masyarakat. Dalam konteks kegagalan integrasi seperti ini, konflik menjadi sebuah gejala penyakit (*syndrom*) yang dapat merusak persatuan dan kesatuan suatu masyarakat dalam sebuah bangsa. *Kedua*, konflik dapat pula dipahami sebagai sebuah proses alamiah dalam rangka proyek rekonstruksi sosial. Dalam konteks ini konflik dilihat secara “fungsional” sebagai suatu strategi untuk menghilangkan unsur-unsur disintegratif di dalam masyarakat yang tidak terintegrasi secara sempurna. Konflik dalam perspektif ini diyakini sebagai sebuah media yang bila terselesaikan dengan baik, justru akan memperkuat proses integrasi dalam masyarakat.

Melalui teori dari Dahrendorf dapat dipelajari bahwa konflik dapat dilihat dari dua kacamata berbeda positif dan negatif. Kedua tipe ini meliputi konflik positif dan konflik negatif. Yang dimaksud dengan Konflik Positif ialah Konflik yang tidak mengancam eksistensi sistem politik, yang biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi. Mekanisme yang dimaksud adalah lembaga–lembaga demokrasi, seperti partai politik, badan–badan perwakilan rakyat, pengadilan, pemerintahan, pers, dan forum–forum terbuka yang lain. Tuntutan akan perubahan yang diajukan oleh sejumlah kelompok masyarakat melalui lembaga–lembaga itu merupakan contoh konflik positif. Sebaliknya Konflik Negatif ialah Konflik yang mengancam eksistensi sistem politik yang biasanya disalurkan melalui cara–cara nonkonstitusional, seperti kudeta, separatisme, terorisme, dan revolusi.

Menurut Taquiri, konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan. Konflik dalam organisasi sering terjadi tidak simetris, terjadi hanya satu pihak yang sadar dan memberikan respon terhadap konflik tersebut. Atau, satu pihak mempersepsikan adanya pihak lain yang telah atau akan menyerang secara negatif (Robbins, 1993; Mengelola Konflik).

Konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami (Pace & Faules, 1994:249. Manajemen Konflik).

Konflik dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok yang berbeda etnik, suku bangsa, ras, agama, golongan,

karena diantara mereka memiliki perbedaan dalam sikap, kepercayaan, nilai atau kebutuhan. Sering kali konflik dimulai dengan hubungan pertentangan antara dua atau lebih individu atau kelompok yang memiliki, atau merasa memiliki, sasaran-sasaran tertentu namun diliputi pemikiran, perasaan, perbuatan, yang tidak sejalan. Bentuk pertentangan alamiah dihasilkan oleh individu atau kelompok etnik, baik interaetnik maupun antaretnik, yang memiliki perbedaan dalam sikap, kepercayaan, nilai-nilai atau kebutuhan (Alo Liliweri, 2005;146).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan suatu konflik bersifat positif atautkah negatif sangat bergantung pada persepsi kelompok yang sedang terlibat dalam konflik. Dalam hal ini yang menjadi patokan positif atau negatif sebuah konflik adalah respon masyarakat terhadap sistem yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari dukungan masyarakat terhadap salah satu kelompok yang berkonflik.

B. Politisasi dalam Konflik Balinuraga

Penulis menjelaskan konsepsi tentang politisasi. Praktek politis dalam konflik Balinuraga tidak ada urgensinya apabila dijadikan tujuan akhir untuk kekuasaan kepentingan yang tidak memihak rakyat. Politisasi adalah praktek politik yang menjadikan isu tertentu sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam kasus Balinuraga, isu tersebut adalah sebuah konflik. Tujuan dari politisasi beranekaragam bentuknya, dari untuk mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kedudukan, mendapatkan sipati masyarakat, sampai mendapatkan sebuah pengakuan. Dalam politisasi, sebuah fenomena bukanlah merupakan suatu tujuan, melainkan sebuah fenomena adalah alat untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam hal ini fenomena tersebut adalah sebuah konflik yang terjadi di Desa Balinuraga.

Konflik seringkali dikaitkan dengan kegiatan politik. Politisasi adalah sebuah cara berfikir yang menjadikan peristiwa sebagai alat mencapai tujuan tertentu dan menjadikan sebuah tujuan adalah sebuah hasil akhir. Tiap-tiap kelompok kepentingan diasumsikan mempunyai tujuan yang berbeda-beda dan mempunyai cara untuk mendapatkan tujuan yang berbeda pula. Tiap kelompok berpikir bahwa cara fikir dan tindak kelompoknya adalah yang paling benar.

Politisasi juga dapat terjadi di dalam kelompok itu sendiri, pemimpin kelompok menanamkan sifat antipati terhadap kelompok lain (*antipathy toward outgroups*), kompensasi-kompensasi yang nyata (*tangible rewards*) dan manipulasi para pemimpin kelompok yang berkonflik "*Leader manipulation*" ditandai oleh adanya pemimpin yang seringkali melihat manfaat bagi diri sendiri atas sebuah konflik yang terjadi. Oleh karenanya ia berusaha meningkatkan provokasi melalui eksploitasi rasa takut dan benci terhadap kelompok lain (Pace & Faules, 1994:249. Manajemen Konflik).

Politisasi mengandung perilaku positif terhadap kelompoknya sendiri (*ingroup*) dan perilaku atau penyikapan negatif terhadap kelompok lain (*outgroups*). Politisasi yang bersifat positif dalam sebuah peristiwa dimaknai sebagai cara untuk mendapatkan tujuan bersama, bukan hanya mencapai sebuah tujuan pribadi atau kelompok saja, melainkan tujuan semua *stakeholder* yang ada didalam peristiwa tersebut. Politisasi ditandai dengan adanya suatu pemanfaatan oleh kelompok (*ingroup*) terhadap sebuah peristiwa.

Menurut Paul Wehr (2003) kompleksitas sumber konflik dapat mendorong kelompok-kelompok kepentingan melakukan mobilisasi pemanfaatan sumber daya konflik dengan kata lain mempolitisasi sebuah konflik. Sumber daya konflik merupakan modal-modal yang dimiliki oleh satu kelompok kepentingan untuk mencapai suatu tujuan dalam relasi konflik dengan kelompok lain. Mobilisasi pemanfaatan sumber daya konflik muncul

dalam bentuk strategi konflik (*conflict strategy*) untuk menciptakan proses–proses dan hasil yang menguntungkan satu kelompok kepentingan (Susan Novri, 2012;20).

Menurut Jacques Bertrand (2004), ada sekurangnya tiga pendekatan yang dapat menjelaskan mengapa konflik seringkali menjadi saluran bagi arus politik dan perjuangan kelompok atau individu dalam mencapai sebuah tujuan. Pendekatan “*konstruktivis*” menekankan pada konteks historis dan sosial yang membentuk, mengubah dan menegaskan batasan-batasan konflik dan akar-akar konflik. Pendekatan “*instrumentalis*” fokus pada peran elit dalam memobilisasi kepentingan-kepentingan di dalam kelompoknya. Pemimpin dan para aktor politik memakai kedekatan emosional dalam kelompok untuk memobilisasi dukungan massa dalam usahanya bersaing dalam memperebutkan kekuasaan, sumber daya dan kepentingan-kepentingan pribadi lainnya. Pendekatan “*primordialis*” menekankan pada warisan dalam keterikatan kelompok berupa ketentuan yang tidak bisa berubah, nasib, dalam batasan-batasan sosial. Kelompok-kelompok kepentingan menurut primordialis, secara inheren memang rawan terhadap beragam bentuk kekerasan terhadap kelompok yang berbeda, dan rawan menciptakan sebuah gesekan–gesekan yang berujung terjadinya konflik, hal itu sebagai sesuatu yang dapat dipolitisasi oleh segelintir orang ataupun kelompok. Politisasi dimaknai sebagai sesuatu yang harus dihilangkan, bukan ditoleransi. Politisasi muncul ketika melihat sebuah peristiwa atau sebuah isu yang berpotensi menimbulkan keuntungan untuk individu atau kelompoknya.

Banyak terdapat aktor–aktor politik yang berani untuk mempolitisasi sebuah kejadian agar dapat mengambil keuntungan dari hal tersebut. Dalam hal konflik balinuraga, politisasi dijadikan alat untuk menambah tingkat intensitas faktor akselerator konflik agar muncul dominasi kekerasan oleh sekelompok masyarakat karena ketidakpuasan

elite politik dalam *sharing of power*. Yang menjadi kursial untuk terus dipertanyakan apakah aktor politik tadi benar-benar dipihak rakyat, atau hanya sekedar berpura-pura untuk memenuhi kebutuhan politik untuk spekulasi dukungan saja, karena biasanya para elit politik akan mengambil keuntungan dari terjadinya konflik itu sendiri.

Dalam konteks kepentingan politis untuk kepentingan pribadi atau merebut kekuasaan, manufer-manufer memang sering dilakukan dengan memanfaatkan situasi yang sedang terjadi, dalam hal ini adalah sebuah konflik yang terjadi di Balinuraga. Dengan adanya konflik, aktor-aktor konflik termasuk para elit politik dapat mengambil keuntungan dengan mempolitisasi sebuah konflik adalah sebuah tranformasi perilaku yang dapat dijadikan penelitian, berawal dari konsepsi tadi maka akan memberikan nilai tersendiri bagi para politisi karena suasana pertarungan politik dibangun atas dasar politisasi. Pilihan yang diberikan kepada rakyat, tidak atas dasar sentimen dan diskriminasi simbol-simbol semata tetapi dukungan yang diberikan karena kemunculan sosok politisi yang diuntungkan yang dapat diterima oleh masyarakat manapun disebabkan oleh kehandalannya menyelesaikan konflik, sikap para elit politik dan komitmennya untuk terus membela rakyat dan bukan karena kepentingan yang melekat pada dirinya namun karena adanya politisasi untuk mengambil keuntungan semata.

Politisasi menjadi ajang bagi para aktor politik untuk menciptakan sebuah penilaian yang baik di dalam masyarakat. Proses politisasi didalam konflik tidak terlepas dari para aktor-aktor yang terdapat daidalam konflik. Aktor-aktor konflik yang terdapat dalam konflik dapat berasal dari kelompok yang berkonflik atau berasal dari luar kelompok yang berkonflik. Aktor-aktor konflik yang berasal dari luar kelompok yang berkonflik termasuk aktor politik yang ada didalamnya. Aktor-aktor politik tersebutlah yang dapat

menjalankan politisasi tersebut. Kepentingan–kepentingan itulah yang melatarbelakangi politisasi terjadi.

Politisasi dapat dilihat dari waktu terjadinya dalam sebuah konflik. Bilamana politisasi terjadi sebelum terjadi konflik dan mengakibatkan konflik tersebut terjadi maka konflik yang terjadi dapat dikatakan karena adanya politisasi atau dilatarbelakangi sebuah politisasi. Namun jika politisasi dilihat setelah konflik terjadi dan mengakibatkan konflik menjadi sedemikian besar maka politisasi bukan merupakan suatu latarbelakang dari konflik yang terjadi.

Pemanfaatan konflik dapat beragam tujuan dari yang untuk mencari nama baik dan untuk pencitraan dalam kepentingan politiknya sampai dengan untuk mengambil sebuah kekuasaan. Dalam fenomena konflik, konflik merupakan gejala yang serba hadir dalam bermasyarakat dan bernegara. Intensitas sebuah konflik didasarkan oleh faktor–faktor yang mempengaruhi sebuah konflik. Konflik dapat berkembang menjadi besar apabila sebuah konflik tidak dikelola dengan sebaik–baiknya dan ditunggangi oleh orang atau kelompok yang ingin mengambil keuntungan. Konflik akan berujung pada tindak kekerasan apabila terdapat aktor–aktor yang terlibat dalam konflik tersebut dan mengambil keuntungan dengan adanya konflik tersebut.

Salah satu dimensi penting proses politisasi ialah penyelesaian konflik yang melibatkan pemerintah. Dalam proses ini rentan adanya adu kepentingan antar aktor politik yang ada dibelakang konflik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Proses “penyelesaian” konflik yang tak bersifat kekerasan dibagi menjadi tiga tahap. Adapun ketiga tahapan ini meliputi tahap politisasi atau koalisi, tahap pembuatan keputusan, dan tahap pelaksanaan dan integrasi. Apabila dalam masyarakat terdapat konflik di antara dua kelompok komunitas etnik, ras, agama, ataupun politik dengan berbagai pihak, dengan segala

motifasi yang mendorong maka masing-masing pihak akan berupaya merumuskan dan mengajukan ide-ide dan pokok pemikirannya agar diketahui dan dibenarkan oleh pihak ketiga, yaitu masyarakat. Satu kebiasaan khas dalam suatu konflik adalah memberikan prioritas yang tinggi guna mempertahankan pihaknya sendiri terutama dalam kepentingan politik. Jika kepentingan lain bertentangan dengan kepentingan pihaknya, maka akan cenderung mengabaikan kepentingan pihak lain tersebut.

Dalam konflik yang terjadi di Balinuraga, etnis , kelompok kepentingan, dan konflik itu sendiri dijadikan oleh segelintir orang atau kelompok untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Hal ini terlihat dari konflik yang terjadi sangat cepat menyebar dan meluas, dan juga intensitas konflik cepat sekali membesar dan sampai memakan korban nyawa. Kemasan politik dengan masih menggunakan simbol-simbol kelompok tidak harus dipertahankan, karena kultur ini akan segera ditinggalkan seiring dengan peningkatan kapasitas masyarakat yang menjadi pintar. Propaganda kelompok sewajarnya ditinggalkan karena pada akhirnya dapat dijadikan politisasi oleh para aktor politik agar konflik tersebut memberikan keuntungan kepada dirinya pribadi. Para warga yang berasal dari kelompok sama merasa konflik sudah dipolitisasi. Konflik tidak akan secara langsung dapat ditunggangi oleh aktor politik yang akan mengambil keuntungan dengan terjadinya konflik tersebut. Konflik tentu saja tidak diperbolehkan ditunggangi oleh aktor politik atau para elit politik dalam merebut kekuasaan. Demikian juga seharusnya dengan para pemimpin yang sedang berkuasa manapun juga yang bertentangan dengan pemerintahan tidak dibenarkan untuk melakukan politisasi.

Bagan kerangka pikir :

